

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENINGKATKAN EKSPOR  
PRODUK HORTIKULTURA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN TAHUN 2015**

**Oleh: Teguh Hidayat**

Email: [hidayatteguh79@gmail.com](mailto:hidayatteguh79@gmail.com)

**Pembimbing Afrizal S.IP MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

***Abstract***

*This research describe the policy Indonesia Government increased of horticulture product toward Asean Economic Community in 2015. Asean Economic Community are one of part Asean Community in economic scope. In Asean Economic Community were be held a common market and skill labour and product in South East Asia Region. In ordre that Indonesia have to create a some policy to increase their natural and human resources.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy Indonesia Government increased of horticulture product toward Asean Economic Community. The theories applied in this research are merchantilism perspective with international cooperation theory.*

*The conclusion of the research about the policy Indonesia Government increased of horticulture product toward Asean Economic Community are doing a increase competitiveness of horticulture product and coordination between institution likes Indonesia Government implemented efficiency product, optimalization of land in BUMN, cooperation between provate sector to investation in production sector and implemented a Supply Chain Management and use a institutional farmer approach to increase a horticulture product.*

**Key words:** *policy, horticulture, Asean Economic Community.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk hortikultura dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Perkembangan politik internasional saat ini, telah merubah pola interaksi antar negara didunia internasional. Saat ini Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan yang menguasai dunia. Telah muncul berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi ataupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya monopoli perdagangan di dunia internasional.

Perkembangan perdagangan internasional mengarah pada bentuk perdagangan yang lebih bebas yang disertai dengan berbagai bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Salah satu tujuan utama perjanjian perdagangan internasional adalah berupaya mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan. Liberalisasi perdagangan dunia dengan pola kerjasama internasional memberikan implikasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Nilai perdagangan dunia tumbuh lebih dari dua kali lipat

dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil dunia.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan posisi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai kebijakan dan upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas ekspor produk hortikultura dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka

---

<sup>1</sup> Soesastro, Hadi, CSIS, Dari Perdagangan Bebas menjadi Pasar Tunggal ASEAN, dalam ASEAN Menatap Masa Depan: 40 tahun ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007

peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah tahun 2015. Tahun 2015 dipilih karena pada saat itu merupakan awal pelaksanaan perjanjian masyarakat ekonomi Asean. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan merkantilisme diperkenalkan oleh Jean Boudin dan Thomas Mun. Perspektif Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke 16 dan 18 yang terjadi pada masa-masa negara Eropa

melakukan proses membangun negara bangsa (*nation state*). Pemikiran kaum merkantilisme menyatakan bahwa logam mulia merupakan lambang kekayaan utama bangsa agar dapat menumpukkan kekayaannya yang dapat dimanfaatkan melalui perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya.<sup>3</sup> Hubungan internasional dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa:

*“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasue is by foreign trade, wherein we must*

<sup>2</sup> Mohtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. 1990. Hlm 26

<sup>3</sup> Oatley. 2004. *International Political Economy Interest and Institution in The Global Economy*. University of North Carolina at Chapel Hill: Pearson Longman

*ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home ini treasure.”<sup>4</sup>*

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan

kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.<sup>5</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam

---

<sup>4</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

---

<sup>5</sup> Syarif, Iiadis. 1996. *Ekonomi Internasional*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo.

melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut, tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.<sup>6</sup>

Kerjasama Internasional merupakan akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia didalam masyarakat internasional. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai.

Kerjasama internasional itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam

bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Dougherty menjelaskan bahwa isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.

---

<sup>6</sup> Anak Agung Banyu Prawita. 2005. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Rosdakarya. Bandung. Hlm 34

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk hortikultura dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean adalah dengan meningkatkan kualitas mutu produksi buah-buahan dan sayuran serta melakukan kerjasama secara nasional dengan instansi Pemerintah dan swasta serta melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia seperti Malaysia, Cina dan India dalam pemasaran produk hortikultura dari Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia sangat kaya dengan keragaman produk hortikultura, dan seharusnya bisa menjadi potensi untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun global. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang penting dan strategis, serta bernilai ekonomi tinggi. Tanaman hortikultura memiliki fungsi esensial bagi tubuh, sebagai sumber protein nabati, vitamin dan mineral, seperti sayuran, buah-buahan, dan juga dapat memberikan fungsi keindahan atau estetika seperti tanaman hias.

Sayuran dan buah-buahan sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan, yang merupakan bagian terpenting dari keseimbangan pangan, harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang

baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Komoditas hortikultura mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumber daya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat.

Produksi buah-buahan dan sayuran nasional dalam 5 tahun terakhir (tahun 2010-2015) menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun tidak signifikan. Pada komoditas buah-buahan mengalami peningkatan produksi sebesar 9%, dan sayuran 0,18%. Di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan buah-buahan dan sayuran seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, peningkatan kesejahteraan, dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran penduduk terhadap manfaat buah dan sayur bagi kesehatan. Adanya potensi peningkatan kebutuhan terhadap buah dan sayur dapat dilihat dari angka konsumsi buah dan sayur masyarakat

Indonesia baru sekitar 34,5 kg/kapita/tahun.<sup>7</sup>

Dengan adanya globalisasi perdagangan dan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, persaingan komoditas hortikultura saat ini sangat ketat, baik di pasar domestik maupun global. Dalam kurun waktu tahun 2004 - 2012 volume ekspor komoditas hortikultura Indonesia cenderung stagnan tidak mengalami peningkatan, justru aktivitas impor semakin bertambah dan mengalami peningkatan secara signifikan, sehingga menjadikan Indonesia mengalami defisit perdagangan hortikultura.

Hal ini menunjukkan setelah diberlakukannya bea masuk nol persen diantara negara-negara peserta masyarakat ekonomi ASEAN Indonesia justru semakin kebanjiran impor produk hortikultura, dan justru tidak mampu meningkatkan volume ekspornya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun perdagangan di sektor pertanian Indonesia dengan Tiongkok mengalami surplus karena lebih didominasi oleh perkebunan atau produk primer seperti kelapa sawit dan karet. Namun untuk ekspor komoditas

hortikultura, Indonesia hanya mampu mengekspor sebagian kecil, justru produk hortikultura dari Tiongkok terus membanjiri pasar lokal Indonesia.

Masyarakat Ekonomi Asean adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan - hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial.

Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi,

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Jakarta



meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.<sup>8</sup>

Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA atau AEC.<sup>12</sup> Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia Nations / ASEAN*) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand (*ASEAN Founding Fathers*). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk MEA. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju MEA. Di tahun ini juga, ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015; untuk mewujudkan MEA 2015, dirumuskan AEC Blueprint, yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil

setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

Bagi ASEAN terbentuknya kawasan perdagangan bebas yang dicapai melalui mekanisme AFTA merupakan suatu keberhasilan karena tariff di kawasan telah berhasil secara bertahap diturunkan sampai dengan nol. ASEAN kemudian ingin lebih meningkatkan kerjasama ekonomi tersebut. Disadari bahwa mengalirnya investasi asing (*foreign direct investment/FDI*) ke kawasan ASEAN yaitu dengan banyaknya perusahaan multinational yang beroperasi di kawasan membutuhkan penyalur barang (*supplier*) yang juga harus ada di kawasan sehingga terjadi efisiensi biaya produksi.<sup>9</sup>

Pasar ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan oleh supplier dari negara-negara ASEAN maka akan sangat membantu negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor asing masuk ke kawasan. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan AEC. Sebelum terbentuknya AEC sebagai bagian dari

---

<sup>8</sup> Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/> (diakses tanggal 25 Juli 2015) Universitas Sumatera Utara

---

<sup>9</sup> AFTA Council, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-tradearea-afta-council>



Masyarakat ASEAN (ASEAN Community), proposal AEC telah dipelajari oleh berbagai institusi, seperti misalnya, the *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, the *ASEAN Institutes of strategic and International Studies (ASEAN-ISIS)*, dan the *ASEAN Secretariat*. Proposal tersebut juga mendapatkan masukan dan saran-saran dari Dewan Penasehat Bisnis ASEAN (*ASEAN Business Advisory Council*) karena negara-negara ASEAN mengakui pentingnya masukan dari kalangan pebisnis bagi integrasi ekonomi yang lebih besar.

Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia, sehingga secara dasar Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing komoditas pertanian dari Indonesia. Komoditas hortikultura, terutama buah-buahan dan sayuran, perlu memperhatikan kualitas dan nilai tambah, jika tidak maka akan kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, terutama setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas produk hortikultura dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean adalah sebagai berikut:

### **1. Pemerintah Indonesia Menerapkan Kebijakan Efisiensi Produksi, Kualitas dan Tampilan produk Hortikultura**

Potensi pengembangan produk hortikultura di Indonesia cukup besar, namun demikian masih terdapat banyak kendala dalam pengembangannya. Produk hortikultura bersifat musiman, harga yang sangat fluktuatif, serta penanganan pasca panen dan penampilan produk olahan yang masih sangat sederhana. Selain itu masih rendahnya dukungan infrastruktur, lemahnya kemampuan sumber daya manusia pertanian, kelembagaan usaha, dan sumber permodalan, menyebabkan rendahnya daya saing produk hortikultura nasional.

Upaya meningkatkan daya saing hortikultura dapat ditempuh melalui peningkatan komponen pembentuk daya saing yang melekat pada produk, seperti produktivitas dan efisiensi produksi, kualitas dan tampilan produk yang memenuhi standar dan menarik bagi konsumen, serta kontinuitas produksi/pasokan. Pada kasus manggis, Indonesia sangat berpeluang meningkatkan ekspor manggis, namun harus mampu bersaing dengan negara penghasil manggis lainnya yaitu Thailand dan

Malaysia. Tanaman manggis di daerah sentra umumnya masih ditanam pada lahan pekarangan dengan teknologi budidaya tradisional, dipelihara turun temurun dan sudah berumur puluhan tahun serta belum tersentuh oleh teknologi maju, sehingga produksi dan mutu buah manggis yang dihasilkan masih rendah.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan adanya pengelolaan kebun manggis secara baik, melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pedoman bagi petani dalam menghasilkan buah manggis yang berkualitas baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Selama 2013 ekspor manggis Indonesia mencapai USD 5,73 juta atau sekitar Rp. 63 miliar. Angka tersebut turun jauh dibandingkan tahun 2012 yakni USD 17,4 juta atau sekitar Rp. 190 miliar. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2013 terjadi penolakan oleh Tiongkok terhadap manggis Indonesia karena dianggap tidak memenuhi standar keamanan pangan, yaitu dengan ditemukannya pestisida pada komoditas manggis tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Shohibul, A. 2013. Revealed Comparative Advantage Measure: ASEAN-China Trade Flows. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 4, No. 7: 136-145

Setelah dilakukan sosialisasi kepada para petani dan eksportir untuk tidak menggunakan pestisida, perbaikan ekspor mulai terlihat pada awal tahun 2014, dalam dua bulan (Januari-Februari), Indonesia sudah mengekspor manggis senilai USD1,66 juta, meningkat 150 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian Indonesia perlu senantiasa memperhatikan standar mutu manggis kualitas ekspor. Persyaratan mutu buah untuk tujuan ekspor adalah buah harus tetap segar, sepal berwarna hijau segar, jumlah sepal lengkap, warna kulit buah hijau kemerahan hingga merah ungu, tangkai buah berwarna hijau segar dan kulit buah mulus tidak cacat, baik cacat mikrobiologis maupun cacat mekanis seperti burik dan tidak bergetah.<sup>11</sup>

Sedangkan standar ukuran buah segar untuk tujuan ekspor adalah Kelas Super A harus berjumlah 6-8 buah/kg, kelas AA berjumlah 10 – 13 buah/kg, dan kelas AAA berjumlah 14-15 buah/kg. Di Indonesia standar mutu buah manggis dapat mengacu kepada SNI, dan untuk perdagangan internasional standar mutu buah mengacu kepada *Standar Codex Stan* 204-1997. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Penelitian Tanaman Buah tropika sudah menghasilkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 12

varietas unggul manggis yaitu Ratu Kamang yang mempunyai standar Kelas Super A, dan varietas Ratu Tembilahan yang tidak bergetah kuning.<sup>12</sup>

## **2. Pemerintah Indonesia Bekerjasama dengan Pihak Swasta dalam Penyediaan Lahan buah-buahan**

Indonesia sangat kaya dengan keragaman produk hortikultura, dan seharusnya bisa menjadi potensi untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun global. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang penting dan strategis, serta bernilai ekonomi tinggi. Tanaman hortikultura memiliki fungsi esensial bagi tubuh, sebagai sumber protein nabati, vitamin dan mineral, seperti sayuran, buah-buahan, dan juga dapat memberikan fungsi keindahan atau estetika seperti tanaman hias.

Sayuran dan buah-buahan sebagai komponen utama pada Pola Pangan Harapan, yang merupakan bagian terpenting dari keseimbangan pangan, harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Komoditas hortikultura mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis

hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumber daya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat.

Produksi buah-buahan dan sayuran nasional dalam 5 tahun terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun tidak signifikan. Pada komoditas buah-buahan mengalami peningkatan produksi sebesar 9%, dan sayuran 0,18%. Di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan buah-buahan dan sayuran seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, peningkatan kesejahteraan, dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran penduduk terhadap manfaat buah dan sayur bagi kesehatan. Adanya potensi peningkatan kebutuhan terhadap buah dan sayur dapat dilihat dari angka konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia baru sekitar 34,5 kg/kapita/tahun.

Oleh karena itu diperlukan optimalisasi kebijakan dalam meningkatkan hasil ekspor produk hortikultura dari Indonesia oleh Pemerintah Indonesia dan salah satu

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 43

langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama produksi bersama pihak swasta. Meskipun nilai ekspornya terus meningkat, Indonesia belum mampu mengeksport buah-buahan sepanjang tahun, karena ekspor Indonesia masih sangat tergantung pada musim buah, dan saat ini umumnya hanya menggantungkan produksi petani. Komoditas buah sudah saatnya diproduksi dalam hamparan luas (perkebunan buah) secara profesional dan menggunakan teknologi maju, seperti teknik produksi buah *off season*.

Dengan demikian, jumlah produksi meningkat, jaminan kontinuitas dan kualitas terjaga. Hal ini bisa ditempuh antara lain: dengan menggalakkan produksi buah di lahan BUMN melalui program optimalisasi lahan yang dimiliki, karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan dan sebagai pengganti komoditas yang sudah tidak menguntungkan dan menggerakkan swasta untuk menanamkan investasinya pada komoditas buah. Kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan BUMN ini diharapkan dapat menghasilkan buah nusantara berkualitas untuk memenuhi kebutuhan buah dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor, terutama

Program penanaman buah di lahan BUMN telah dimulai oleh PTPN XII sejak 2009, menyusul kemudian PTPN VIII dan PTPN IX sejak 2012 bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian. Kerjasama dengan PTPN tersebut adalah untuk penyediaan bibit dan anjuran penerapan teknologi buah.

Sampai dengan Mei 2013, telah dikirimkan bibit durian Matahari sebanyak 11.000 batang, manggis varietas Wanayasa dan Puspahiyang 18.000 batang, Sirsak 16.000, nanas 500.000 dan pepaya Merah Delima 50.000, dengan target penanaman 2300 Ha pada tahun 2013 dan menjadi 12.000 Ha pada tahun 2017. Disamping itu untuk meningkatkan produksi jeruk nasional baik sebagai komoditas substitusi impor maupun untuk komoditas ekspor, upaya yang telah dilakukan adalah dengan adanya kerjasama Badan Litbang Pertanian yang dalam hal ini dilakukan oleh Puslitbang Hortikultura, yang bertujuan untuk menyusun rancang bangun dan melakukan pendampingan penerapan teknologi inovatif pengembangan tanaman jeruk dan buah subtropika di kebun-kebun wilayah kerja PTPN VIII. Perjanjian kerjasama tersebut diharapkan dapat mendorong berkembangnya kawasan agribisnis jeruk dan buah subtropika di Provinsi Jawa Barat.

### 3. Pemerintah Indonesia Menerapkan Sistem *Supply Chain Management* dan Fasilitas Terpadu

Pembangunan agribisnis hortikultura perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan perangkat penunjangnya menuju keseimbangan antara usaha promosi peningkatan produksi, perbaikan distribusi dan promosi peningkatan konsumsi, yang menguntungkan semua pihak. Untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang ada, membuat analisis kebutuhan perbaikan, menetapkan target-target perbaikan dan menyusun rencana aksinya perlu digunakan pendekatan *Supply Chain Management* atau Pengelolaan Rantai Pasokan.

*Supply Chain Management* adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen). Konsep *Supply Chain Management* dilakukan agar peningkatan daya saing itu tidak semata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk,

tetapi juga melalui pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sistematis.<sup>13</sup>

*Supply Chain Management* merupakan siklus lengkap produksi, mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktifitas produksi sampai siap untuk digunakan oleh pemakai/ user. Pendekatan *Supply Chain Management* didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Proses budidaya untuk menghasilkan produk (hortikultura),
- b. Mentranformasikan bahan mentah (penanganan panen dan pasca panen), dan
- c. Pengiriman produk ke konsumen melalui sistem distribusi.<sup>14</sup>

Selain menerapkan sistem *Supply Chain Management*, maka Pemerintah Indonesia juga menerapkan cara lainnya yaitu dengan fasilitas terpadu hortikultura. peningkatan daya saing memerlukan inovasi masyarakat dan pemerintah baik untuk memperbaiki kinerja sistem segmen rantai pasokan yang sudah ada mampu

---

<sup>13</sup> Chan JO. 2007. A Predictive Analytic Model For Value Chain Management. *Journal of International Technology and Information Management*.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 32

membangun rantai pasokan yang baru. Investasi tersebut memerlukan fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kewenangan yang berbeda.

Oleh karena itu dibangun suatu jejaring kerja yang diwadahi dalam suatu wadah koordinasi melalui Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH). Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura merupakan konsep yang digunakan untuk menciptakan iklim usaha di bidang hortikultura yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk. Selain mengintegrasikan pelayanan dan program dari seluruh kelembagaan yang berperan dalam pengembangan usaha, FATIH juga digunakan untuk membenahi dan meningkatkan efisiensi dari pengelolaan rantai pasokan *Supply Chain Management* komoditas hortikultura.

#### **4. Pemerintah Indonesia Menggunakan Pendekatan Kelembagaan Petani dalam Peningkatan Produksi Hortikultura**

Kawasan agribisnis hortikultura adalah suatu ruang geografis yang didelinsi oleh batas imajiner ekosistem dan disatukan oleh fasilitasi infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang

berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.

Kelembagaan petani merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha bisnis hortikultura, guna merespon pasar dan persaingan, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengefektifkan pelayanan yang menunjang pengembangan usaha agribisnis. Kelembagaan usaha menjadikan petani memiliki kemandirian usaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk mampu bersaing. Pengembangan kelembagaan ditingkat petani diarahkan untuk membentuk kelompok tani, asosiasi produsen atau koperasi usaha sehingga dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*).<sup>15</sup> Untuk memperkuat aspek kelembagaan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain : penguatan manajemen kelompok melalui pola partisipatif, fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan pedagang atau pengusaha, fasilitasi pertemuan pelaku usaha untuk pengaturan logistik dan

---

<sup>15</sup> Anantanyu S. 2011. Kelembagaan Petani; Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.

distribusi, pertemuan pelaku usaha dalam rangka tukar-menukar informasi suplai dan distribusi, disamping penguatan modal usaha kelompok.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk hortikultura dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 adalah dengan melakukan peningkatan komponen pembentuk daya saing yang melekat pada produk hortikultura dan kerjasama antar instansi Pemerintah.

Selain kebijakan tersebut, diperlukan juga perhatian dalam pengembangan komoditas berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif, yaitu produk hortikultura Indonesia aman dikonsumsi dengan memenuhi standar keamanan pangan, lebih berkualitas, dan kontinuitasnya terjaga, serta mempunyai harga yang relatif lebih murah dibandingkan produk impor. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu menerapkan berbagai kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari Masyarakat Ekonomi Asean dan persaingan dengan negara lain, selain itu untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional Indonesia dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean diperlukan beberapa upaya kebijakan strategis dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, kualitas dan tampilan produk yang memenuhi standar dan menarik bagi konsumen, serta kontinuitas produksi/pasokan.
2. Pemerintah Indonesia menggalakkan produksi buah di lahan BUMN melalui program optimalisasi lahan.
3. Pemerintah Indonesia menggerakkan pihak swasta untuk menanamkan investasinya pada komoditas buah seperti kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan PTPN dalam penyediaan lahan buah-buahan.
4. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem *Supply Chain Management* dalam meningkatkan komoditas produksi dan ekspor produk hortikultura.
5. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kelembagaan petani dalam meningkatkan komoditas produksi hortikultura.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Anantanyu S. 2011. *Kelembagaan Petani; Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Vol 2 Nomor 3 tahun 2014.

Chan JO. 2007. *A Predictive Analytic Model For Value Chain Management*. *Journal of International Technology and Information Management*. Flows. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 7:

Shohibul, A. 2013. Revealed Comparative Advantage Measure: ASEAN-China Trade

### Buku

Anak Agung Banyu Prawita. 2005. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Rosdakarya. Bandung.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Jakarta.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. 1990.

Oatley. 2004. *International Political Economy Interest and Institution in The Global Economy*. University of North Carolina at Chapel Hill: Pearson Longman.

Soesastro, Hadi, CSIS, Dari Perdagangan Bebas menjadi Pasar Tunggal ASEAN, dalam ASEAN Menatap Masa Depan: 40 tahun ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007

Syarif, Iiadis. 1996. *Ekonomi Internasional*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo.

### Website

AFTA Council,  
<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-tradearea-afta-council>

Integrasi Ekonomi ASEAN 2015,  
<https://www.academia.edu/9503310/> (diakses tanggal 25 Juli 2015) Universitas Sumatera Utara